ANALISIS PEMIKIRAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL GUS DUR DAN RELEVANSINYA DENGAN MODERASI BERAGAMA

Nur Rohfitta[1], Silpa[2], Chairul Anwar[3], Subandi[4], Riyuzen Praja Tuala[5]
[1,2,3,4,5]Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
nurrohfitta26@gmail.com[1], silpa.sulis@gmail.com[2], anwar@radenintanac.id[3],
subandi@radenintan.ac.id[4], riyuzen@radenintan.ac.id[5]

ABSTRACT

This article analyzes the multicultural education thought of Abdurrahman Wahid (Gus Dur) and its relevance to religious moderation in Indonesia. The background is the persistence of intolerance and exclusive attitudes in educational environments, while religious moderation has been promoted as a national policy direction. This study aims to describe the main ideas of Gus Dur on multicultural education and to examine how they relate to the four indicators of religious moderation. The research uses a qualitative library research method. Data were drawn from scholarly articles, books, and official documents published between 2016 and 2026 that examine Gus Dur's thought, multicultural education, and religious moderation, and were analyzed using content analysis through data reduction, categorization, interpretation, and conclusion drawing. The findings show that Gus Dur's thought rests on four pillars: humanity, justice, and liberation; contextualization and the indigenization of Islam; pluralism, inclusivism, and the protection of minorities; and dialogue and democracy. These pillars are in line with the four indicators of religious moderation, namely national commitment, tolerance, anti-violence, and accommodation of local culture, and they can be translated into the dimensions of multicultural education. This article concludes that Gus Dur's thought provides a strong conceptual foundation for strengthening religious moderation through Islamic religious education in schools and madrasahs.

Keywords: multicultural education, Gus Dur, religious moderation, library research

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis pemikiran pendidikan multikultural Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan relevansinya dengan moderasi beragama di Indonesia. Latar belakangnya adalah masih munculnya sikap intoleran dan eksklusif di lingkungan pendidikan, sementara moderasi beragama telah ditetapkan sebagai arah kebijakan nasional. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan gagasan pokok Gus Dur tentang pendidikan multikultural dan mengkaji keterkaitannya dengan empat indikator moderasi beragama. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif jenis studi kepustakaan (*library research*). Data bersumber dari artikel jurnal, buku, dan dokumen resmi terbitan 2016 sampai 2026 yang mengkaji pemikiran Gus Dur, pendidikan multikultural, dan moderasi beragama, kemudian dianalisis dengan analisis isi (*content analysis*) melalui tahap reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan simpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Gus Dur bertumpu pada empat pilar, yaitu kemanusiaan, keadilan, dan pembebasan; kontekstualisasi dan pribumisasi Islam; pluralisme, inklusivisme, dan pembelaan terhadap minoritas; serta dialog dan demokrasi. Keempat pilar tersebut sejalan dengan empat indikator moderasi beragama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal, serta dapat

diterjemahkan ke dalam dimensi pendidikan multikultural. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemikiran Gus Dur memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memperkuat moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah.

Kata Kunci: pendidikan multikultural, Gus Dur, moderasi beragama, studi kepustakaan

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan keragaman suku, bahasa, budaya, dan agama yang sangat luas. Keragaman ini merupakan kekayaan bangsa, tetapi juga menyimpan potensi ketegangan apabila tidak dikelola dengan sikap yang dewasa. (Akhmadi, 2019) memandang moderasi beragama sebagai kebutuhan praktis dalam kehidupan Indonesia yang majemuk, karena keragaman tidak mungkin dihilangkan dan karenanya harus dihadapi dengan sikap beragama yang seimbang. Lembaga pendidikan menjadi salah satu ruang yang paling menentukan dalam upaya itu, sebab di sanalah nilai, cara pandang, dan sikap sosial peserta didik dibentuk.

Pemerintah telah menempatkan moderasi beragama sebagai arah kebijakan dan perspektif dalam pendidikan agama. (RI, 2019) merumuskannya sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah, tidak berlebihan, adil, dan berimbang, dengan empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Ikhwan, Azhar, Wahyudi, dan Alfiyanto menegaskan bahwa pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam memperkuat moderasi beragama, termasuk melalui penguatan sikap kritis dan penghargaan terhadap keragaman (Ikhwan, Wahyudi, & Alfiyanto, 2023). Rumusan kebijakan tersebut tetap memerlukan dukungan gagasan pendidikan yang mampu menerjemahkan nilai moderasi ke dalam kehidupan sekolah dan madrasah sehari-hari.

Salah satu tokoh yang gagasannya relevan dengan kebutuhan itu adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (1940–2009), tokoh Nahdlatul Ulama yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Pendekatan Gus Dur yang dinamis dan inklusif dalam pendidikan maupun politik dibaca oleh banyak peneliti sebagai cerminan visinya untuk membangun Indonesia

yang majemuk, demokratis, serta menghargai hak asasi manusia dan kebebasan beragama (Ardiyansyah, Fatkhurrohman, & Saefullah, 2024). Gus Dur tidak menulis tentang pendidikan multikultural dalam arti teknis pedagogis, tetapi gagasannya tentang pluralisme, kemanusiaan, dan demokrasi memuat substansi yang sangat dekat dengan tujuan pendidikan multikultural.

(Banks, 2016) memandang pendidikan multikultural sebagai gagasan, gerakan pembaruan pendidikan, sekaligus proses yang berupaya mengubah sekolah agar peserta didik dari beragam kelompok memperoleh kesempatan belajar yang setara. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, sejumlah penelitian terbaru telah mengkaji pemikiran Gus Dur dengan lensa tersebut. (Mulyadi, 2019) membahas pemikiran Gus Dur tentang pendidikan Islam multikultural. (Khoirul, 2022) menemukan bahwa pendidikan multikultural Gus Dur memiliki dua aspek, yaitu keberagaman serta demokrasi dan hak asasi manusia. (Setyazi, Subandi, & Abas, 2022) membandingkan konsep pendidikan multikultural Gus Dur dengan Nurcholish Madjid. (Syaifudin & Syafi'i, 2025) menunjukkan relevansi gagasan Gus Dur bagi pendidikan agama Islam yang inklusif dan humanis, dan (Zulfandika & Wulandari, 2024) menelaah nilai-nilai pendidikan moderasi beragama dalam kepemimpinan Gus Dur.

Kajian-kajian tersebut memberi dasar yang kuat, tetapi umumnya belum memetakan secara terstruktur keterkaitan antara pilar pemikiran multikultural Gus Dur dan empat indikator moderasi beragama yang dirumuskan Kementerian Agama RI. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut. Rumusan masalahnya adalah: (1) bagaimana pemikiran pendidikan multikultural Gus Dur, dan (2) bagaimana relevansinya dengan moderasi beragama. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pemikiran tersebut serta menganalisis keterkaitannya dengan moderasi beragama. Manfaat teoretisnya adalah memperkaya kajian pendidikan multikultural berbasis pemikiran tokoh Muslim Indonesia, sedangkan manfaat praktisnya adalah menjadi rujukan bagi guru pendidikan agama Islam dalam merancang pembelajaran yang moderat dan inklusif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang data utamanya diperoleh dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti artikel jurnal, buku, dan dokumen resmi, tanpa penelitian lapangan (Snyder, 2019). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa gagasan dan pemikiran tokoh yang terdokumentasi dalam bentuk tulisan.

Sumber data dibatasi pada karya yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir (2016–2026) dan dikelompokkan menjadi tiga. Kelompok pertama adalah kajian tentang pemikiran Gus Dur dalam pendidikan, yaitu Mulyadi, Khoirul, Setyazi et al., Ardiyansyah et al., Zulfandika dan Wulandari, serta Syaifudin dan Syafi'i. Kelompok kedua adalah rujukan teoretis tentang pendidikan multikultural Banks. Kelompok ketiga adalah rujukan tentang moderasi beragama, yaitu Akhmadi, Kementerian Agama RI, dan Ikhwan et al. Karena sumber-sumber tersebut merupakan kajian terhadap karya Gus Dur, gagasan Gus Dur dalam artikel ini dibaca melalui telaah para peneliti tersebut, dan hal ini diakui sebagai keterbatasan.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, dan mencatat bagian-bagian yang relevan dengan fokus kajian. Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) (Krippendorff, 2018) melalui empat tahap. Pertama, reduksi data, yaitu memilih gagasan yang berkaitan dengan multikulturalisme dan kehidupan beragama. Kedua, kategorisasi, yaitu mengelompokkan gagasan tersebut ke dalam tema-tema pokok. Ketiga, interpretasi, yaitu menafsirkan tema-tema itu dalam kerangka pendidikan multikultural dan indikator moderasi beragama. Keempat, penarikan simpulan. Keabsahan data dijaga dengan membandingkan temuan antarsumber (triangulasi sumber).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Latar dan Konteks Pemikiran Gus Dur

Gus Dur tumbuh dalam tradisi pesantren yang kuat, tetapi sekaligus akrab dengan khazanah pemikiran modern. Latar ini membentuk corak pemikirannya yang memadukan

kedalaman tradisi Islam dengan keterbukaan terhadap nilai kemanusiaan universal. Dalam pandangan pendidikan, Gus Dur disebut memandang pendidikan sebagai proses yang harus mengikuti perkembangan zaman, memadukan pengetahuan klasik dan modern tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam, serta menghindari pendekatan yang bersifat doktrinal (Ardiyansyah et al., 2024).

Salah satu contoh penghormatan terhadap keragaman yang sering dikutip adalah langkahnya pada masa kepresidenan mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000. Langkah tersebut memulihkan kebebasan etnis Tionghoa untuk menjalankan agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya secara terbuka. Peristiwa ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap keragaman bagi Gus Dur bukan sekadar sikap pribadi, tetapi prinsip yang diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Prinsip yang sama relevan bagi dunia pendidikan: sekolah semestinya menjadi ruang yang memperlakukan setiap peserta didik secara adil tanpa memandang latar belakang agama, suku, dan budayanya.

2. Pilar Pemikiran Pendidikan Multikultural Gus Dur

Berdasarkan telaah terhadap kajian-kajian terbaru tentang Gus Dur, ditemukan empat pilar yang membentuk kerangka pemikiran multikulturalnya dan dapat dibaca sebagai fondasi pendidikan multikultural.

Pilar pertama adalah kemanusiaan, keadilan, dan pembebasan. (Syaifudin & Syafi'i, 2025) menempatkan humanisme sebagai salah satu nilai dasar pemikiran Gus Dur dalam pendidikan agama Islam, sedangkan (Ardiyansyah et al., 2024) menunjukkan bahwa pembebasan dan humanisme termasuk nilai yang menghubungkan pendidikan Islam dengan moderasi beragama. Pandangan ini sejalan dengan penegasan Al-Qur'an bahwa Allah memuliakan anak cucu Adam (QS. Al-Isra: 70). Dalam kerangka pendidikan, pilar ini berarti bahwa proses belajar harus menumbuhkan empati dan penghargaan terhadap martabat setiap orang, termasuk mereka yang berbeda keyakinan, serta

membebaskan peserta didik dari cara beragama yang kaku dan doktrinal.

Pilar kedua adalah kontekstualisasi dan pribumisasi Islam. (Khoirul, 2022) mencatat bahwa Gus Dur menekankan pentingnya pendidikan yang percaya diri dengan kultur yang dibawanya, dan mengaitkannya dengan gagasan pribumisasi Islam. (Syaifudin & Syafi'i, 2025) juga menekankan perlunya kurikulum yang kontekstual. Pribumisasi bukan upaya mencampuradukkan agama dengan budaya, melainkan cara agar ajaran Islam dapat berakar dan berdialog dengan tradisi lokal. Dalam pendidikan multikultural, pilar ini berarti pengakuan terhadap budaya lokal peserta didik sebagai sumber belajar yang sah, bukan sebagai penghalang pembelajaran agama.

Pilar ketiga adalah pluralisme, inklusivisme, dan pembelaan terhadap minoritas. Menurut (Syaifudin & Syafi'i, 2025), inklusivisme dan pluralisme merupakan dasar bagi Gus Dur dalam menyikapi keragaman masyarakat Indonesia. (Setyazi et al., 2022) melaporkan bahwa dalam konteks multikultural, Gus Dur berpandangan bahwa pendidikan Islam harus beragam. Sikap ini sejalan dengan pesan Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal (QS. Al-Hujurat: 13) dan dengan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah: 256). Pembelaan terhadap kelompok minoritas, seperti pada kebijakan terhadap etnis Tionghoa, memperlihatkan bahwa pluralisme tidak cukup dimaknai sebagai toleransi pasif, tetapi juga menuntut keberpihakan pada pihak yang lemah.

Pilar keempat adalah dialog dan demokrasi. (Khoirul, 2022) menyimpulkan bahwa pendidikan multikultural Gus Dur mencakup aspek demokrasi dan hak asasi manusia, dan bahwa metode pembelajaran pendidikan agama Islam seharusnya demokratis serta mendorong komunikasi antara peserta didik dan pendidik. Dalam pendidikan, pilar ini menuntut pembelajaran yang dialogis dan partisipatif, yang memberi ruang bagi peserta didik untuk menyampaikan pendapat dan mendengarkan pandangan yang berbeda.

Keempat pilar tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Gus Dur memiliki karakter yang konsisten:

berakar pada nilai-nilai Islam, tetapi terbuka dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Gagasan ini sejalan dengan pengertian pendidikan multikultural menurut (Banks, 2016) yakni pendidikan yang berupaya menjamin kesetaraan kesempatan belajar bagi peserta didik dari beragam latar belakang.

3. Konsep Moderasi Beragama

Secara bahasa, moderasi beragama berkaitan dengan konsep wasathiyah, yaitu sikap tengah yang adil dan berimbang. Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan, umat pertengahan yang menjadi saksi atas manusia (QS. Al-Baqarah: 143). Dalam dokumen (RI, 2019) moderasi beragama dimaknai sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah, bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Moderasi tidak berarti mengurangi kesungguhan beragama, tetapi menghindari sikap berlebihan, baik yang terlalu kaku maupun yang terlalu longgar (Akhmadi, 2019).

Empat indikator yang dirumuskan (RI, 2019) menjadi alat ukur praktis moderasi beragama. Komitmen kebangsaan berkaitan dengan penerimaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Toleransi berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dan pendapat. Anti-kekerasan berkaitan dengan penolakan terhadap cara-cara kekerasan, baik fisik maupun verbal, atas nama agama. Akomodatif terhadap budaya lokal berkaitan dengan kesediaan menerima praktik budaya setempat selama tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

4. Relevansi Pemikiran Gus Dur dengan Moderasi Beragama

Analisis menunjukkan adanya kesesuaian yang erat antara empat pilar pemikiran Gus Dur dan empat indikator moderasi beragama. Kesesuaian ini sejalan dengan temuan (Ardiyansyah et al., 2024) bahwa pendidikan Islam menurut Gus Dur relevan dengan moderasi beragama melalui nilai multikulturalisme, pembebasan, humanisme, dan inklusivitas. Ringkasan keterkaitan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Keterkaitan Pilar Pemikiran Gus Dur dengan Indikator Moderasi Beragama dan Dimensi Pendidikan Multikultural

Pilar Pemikiran Gus Dur	Indikator Moderasi Beragama	Wujud dalam Pendidikan
Kemanusiaan, keadilan, dan pembebasan	Anti-kekerasan	Penyelesaian konflik secara damai, empati, dan perlakuan adil kepada semua peserta didik
Kontekstualisasi dan pribumisasi Islam	Akomodatif terhadap budaya lokal	Pemanfaatan budaya lokal sebagai sumber belajar; integrasi isi dan konstruksi pengetahuan
Pluralisme, inklusivisme, dan pembelaan terhadap minoritas	Toleransi	Pengurangan prasangka, pedagogi kesetaraan, dan perlindungan dari diskriminasi
Dialog dan demokrasi	Komitmen kebangsaan	Pembelajaran dialogis dan partisipatif; budaya sekolah yang memberdayakan

Pertama, pilar kemanusiaan, keadilan, dan pembebasan menopang indikator anti-kekerasan. Jika martabat manusia ditempatkan sebagai tujuan utama beragama, kekerasan atas nama agama kehilangan pembenarannya. Dalam pembelajaran, pandangan ini dapat diwujudkan dengan menanamkan penyelesaian konflik secara damai dan sikap tidak mudah menghakimi sesama.

Kedua, pilar kontekstualisasi dan pribumisasi Islam menopang indikator akomodatif terhadap budaya lokal. Keduanya sama-sama menekankan bahwa praktik keagamaan yang ramah terhadap tradisi setempat bukan bentuk penyimpangan, melainkan cara agama hadir secara kontekstual. Bagi guru pendidikan agama Islam, hal ini berarti perlunya kemampuan menjelaskan ajaran agama dengan menggunakan contoh, bahasa, dan nilai-nilai yang akrab dalam kehidupan peserta didik, sekaligus membedakan secara jelas antara pokok ajaran dan ekspresi budaya.

Ketiga, pilar pluralisme, inklusivisme, dan pembelaan terhadap minoritas menopang indikator toleransi. Toleransi dalam perspektif ini bersifat aktif karena disertai penghormatan dan perlindungan terhadap hak pihak lain, bukan hanya membiarkan keberadaan mereka. Sikap seperti ini dapat dibangun di sekolah melalui perlakuan yang setara kepada seluruh peserta didik, penghormatan terhadap perayaan keagamaan yang berbeda, dan penolakan terhadap ujaran yang merendahkan kelompok tertentu.

Keempat, pilar dialog dan demokrasi menopang indikator komitmen kebangsaan. Keislaman dan keindonesiaan tidak perlu dipertentangkan; keduanya dapat berjalan beriringan dalam bingkai negara bangsa yang demokratis dan menjunjung kesetaraan warga negara. Pendidikan yang membiasakan dialog, musyawarah, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat akan melatih peserta didik menjadi warga negara yang berkomitmen pada kebangsaan tanpa kehilangan identitas keagamaannya.

Keterkaitan tersebut juga dapat dibaca melalui lima dimensi pendidikan multikultural yang dirumuskan (Banks, 2016), yaitu integrasi isi, proses konstruksi pengetahuan, pengurangan prasangka, pedagogi kesetaraan, serta budaya sekolah dan struktur sosial yang memberdayakan. Gagasan kontekstualisasi dan pribumisasi Islam sejalan dengan dimensi integrasi isi dan konstruksi pengetahuan karena mendorong penggunaan khazanah budaya lokal dalam pembelajaran. Gagasan dialog dan pembelaan minoritas sejalan dengan dimensi pengurangan prasangka dan pedagogi kesetaraan. Adapun gagasan keadilan dan demokrasi sejalan dengan dimensi budaya sekolah yang memberdayakan, yakni sekolah yang aturan dan praktiknya menjamin keadilan bagi semua warganya.

5. Implikasi bagi Pendidikan Agama Islam

Temuan di atas memiliki sejumlah implikasi bagi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah. Pada aspek kurikulum, (Syaifudin & Syafi'i, 2025) menekankan kurikulum yang kontekstual dan penguatan pendidikan karakter berbasis toleransi. Materi akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam dapat diperkaya dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghargaan terhadap keragaman, sehingga moderasi beragama tidak berdiri sebagai topik tersendiri, tetapi terintegrasi dalam seluruh materi. (Ikhwan et al., 2023) juga menilai bahwa banyak materi pendidikan agama Islam pada dasarnya telah sejalan dengan moderasi beragama, sehingga yang diperlukan adalah penguatan cara pengajarannya.

Pada aspek metode, guru dapat menggunakan diskusi, studi kasus,

kerja kelompok lintas latar belakang, dan proyek berbasis budaya lokal agar peserta didik terbiasa berdialog dan bekerja sama dengan teman yang berbeda. Hal ini sejalan dengan tekanan (Khoirul, 2022) pada metode yang demokratis dan komunikatif. Pada aspek keteladanan, guru perlu menampilkan sikap yang adil, terbuka, dan santun dalam menyikapi perbedaan, sebab peserta didik belajar tidak hanya dari penjelasan, tetapi juga dari perilaku pendidiknya. Pada aspek budaya sekolah, kebijakan dan tata tertib perlu memastikan tidak ada diskriminasi dan perundungan berbasis identitas.

Perlu dicatat bahwa kajian ini memiliki keterbatasan sebagai penelitian kepustakaan. Analisis bersandar pada teks yang tersedia, membaca gagasan Gus Dur melalui kajian peneliti lain, dan tidak menguji secara empiris efektivitas penerapannya di kelas. Karena itu, hasil kajian ini lebih tepat dipandang sebagai kerangka konseptual yang perlu diuji lebih lanjut dalam penelitian lapangan.

D. Kesimpulan

Pemikiran Gus Dur tentang pendidikan multikultural bertumpu pada empat pilar, yaitu kemanusiaan, keadilan, dan pembebasan; kontekstualisasi dan pribumisasi Islam; pluralisme, inklusivisme, dan pembelaan terhadap minoritas; serta dialog dan demokrasi. Keempat pilar tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan empat indikator moderasi beragama: kemanusiaan menopang sikap anti-kekerasan, pribumisasi Islam menopang akomodasi terhadap budaya lokal, pluralisme menopang toleransi, dan dialog serta demokrasi menopang komitmen kebangsaan. Dengan demikian, pemikiran Gus Dur relevan dan dapat dijadikan landasan untuk memperkuat moderasi beragama dalam pendidikan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar guru pendidikan agama Islam mengintegrasikan nilai-nilai pemikiran Gus Dur ke dalam perencanaan, metode, dan evaluasi pembelajaran, serta agar pimpinan lembaga pendidikan menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan adil. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menelaah langsung karya-karya asli Gus Dur dan melakukan penelitian lapangan guna menguji penerapan dan efektivitas gagasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, *13*(2), 45–55. Retrieved from https://bdksurabaya.e-journal.id/bdksurabaya/article/download/82/45

Ardiyansyah, M. R., Fatkhurrohman, & Saefullah, M. (2024). Konsep Moderasi Beragama Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Pemikiran K . H . Abdurrahman Wahid. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, *2*(4), 20–29. https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i4.1389

Banks, J. A. (2016). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching (6th ed.)*. New York: Routledge.

Ikhwan, M., Wahyudi, D., & Alfiyanto, A. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Indonesia. *Realita Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, *21*(1), 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.30762/realita.v21i1.148

Khoirul. (2022). Multikulturalisme dan Kurikulum PAI dalam Perspektif Gusdur. *Al-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan*, *32*(2), 1–6. https://doi.org/10.24235/ath.v

Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (4th ed.)*. California: SAGE Publications.

Mulyadi. (2019). Pemikiran Gus Dur tentang Pendidikan Islam Multikultural. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, *12*(2), 149–165. https://doi.org/https://doi.org/10.37812/fikroh.v12i2.51

RI, B. L. dan D. K. A. (2019). *Moderasi beragama*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Setyazi, G., Subandi, & Abas, E. (2022). Pendidikan Multikultural dalam Bingkai Pemikiran Nasionalis Religius ; Komparasi Konsep Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, *3*(2), 191–208. https://doi.org/https://doi.org/10.53802/fitrah.v3i2.271

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*,

104(August), 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Syaifudin, M., & Syafi'i, I. (2025). Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Multikulturalisme dalam Pendidikan Agama Islam. *Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(2), 221–236. https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i2.25103

Zulfandika, A. A., & Wulandari, S. C. (2024). Analisis Nilai-Nilai Kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Dalam Pendidikan Moderasi Beragama. *Wasis: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, *5*(1), 67–73. https://doi.org/10.24176/wasis.v5i1.12543